



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 590/33 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM TERPADU VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2024 ✓**

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Katingan dan dalam rangka memberikan pedoman dan pertanggungjawaban hukum yang jelas atas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Katingan, maka dirasa perlu membentuk Tim Terpadu Verifikasi dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2024; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan; ✓
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Alw

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1744);



11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024. ✓**
- KESATU** : Tim terpadu verifikasi dan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh tim ahli pendamping sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan instansi yang memerlukan tanah terkait persiapan pengadaan tanah skala kecil;
 - b. Melakukan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - c. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - d. Melaksanakan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. Mengkaji perhitungan ganti rugi ruang atas tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan dengan obyek tanah bersama tim penilai yang berwenang;
 - f. Melakukan mediasi, negosiasi dan pelaporan hasil akhir tindaklanjut kegiatan;
 - g. Melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati;
- KEEMPAT** : Instansi yang memerlukan tanah wajib membuat dokumen perencanaan dalam bentuk proposal sederhana sebagai bahan usulan pengadaan tanah berskala kecil (di bawah 5 ha), minimal H-1 tahun anggaran pelaksanaan kegiatan, dengan sistematika isi dokumen sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 2. Letak tanah;
 3. Status tanah;
 4. Luas tanah yang dibutuhkan;
 5. Perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan;
 6. Rencana alokasi biaya pengadaan tanah;
 7. Perkiraan asumsi nilai tanah (dapat menggunakan jasa/konsultan penilai);
 8. Surat pernyataan pemilik tanah bersedia untuk melepaskan tanahnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku (lampiran *fotocopy* surat / legalitas tanah);
 9. Surat pernyataan kesesuaian dengan tata ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

fw

- KELIMA** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai berlaku sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024;
Dengan Kontak saran :
Telepon : 082151521734
Email : bidangpertanahankatingan@gmail.com
Instagram : bidang.pertanahan-kab.katingan
Facebook : bidang Pertanahan Katingan Disperkimtan
- KEENAM** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pj. Bupati Katingan;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dokumen Pelaksana Anggaran instansi yang membutuhkan Tanah dan masing-masing perangkat daerah terkait Tahun Anggaran 2024;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 15 Februari 2024



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya :
u.p. Kepala Biro Pembangunan Umum;
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. a. Kepala Bagian Hukum
b. Kepala Bagian Pemerintahan
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 590/33 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TERPADU VERIFIKASI DAN
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH SKALA
KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGA UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	PRANSANG, S.Sos.,M.A.P. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19641216 198602 1 003	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN	PENGARAH
2.	HARIAWAN, S.Sos., M.AP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660308 198703 1 010	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KATINGAN	KETUA
3.	ADVENTUS, SE., M.AP. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680505 199903 1 006	KEPALA DINAS PERUMAHAN, RAKYAT KAWASAN, PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN	WAKIL KETUA
4.	RAMOS FENTUS MANALU, ST. Pembina Tingkat I (III/d) NIP. 19850430. 201001 1 005	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, RAKYAT KAWASAN, PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN	SEKRETARIS
5.	EKA METRIA, S.STP.,M.A.P. Pembina (IV/a) NIP.19850505 200312 2 003	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KATINGAN	WAKIL SEKRETARIS
6.	IWAN SUSANTO, S,ST,MAP Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19780502 199803 1 004	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
7.	Dr. Ir. CHRISTIAN RAIN, MT. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680813 199503 1 004	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
8.	Drs. RISNADUAR, M.A.P. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651123 199302 1 002	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
9.	WIM, SE., M.Si. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651110 199103 1 016	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
10.	Drs. KABUL MUSTIMAN Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670730 1990120 1 001	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
11.	HARIAWAN, S.Sos., M.AP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660308 198703 1 010	Pjt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
12.	Drs.DEDDY FERRAS, M.Si., CGCAE. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19701004 199003 1 005	INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA

h

13.	HENNI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690403198911 2 001	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
14.	YOBIE SANDRA, S.STP., M.A Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19820304200012 1 001	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
15.	Dr. ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681119 200003 1 003	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
16.	Drs. SUKARTIE ALLJAT Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660413 199302 1 002	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
17.	FERISO, SE. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650616 199203 1 013	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
18.	ELMON SIANTURI, S.H. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640428 198603 1 006	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
19.	PIMANTO, S.Sos. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650107 198603 1 014	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
20.	JONIANITO, SP,M.AP. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660601 199803 1 005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
21.	BAMBANG HARIANTO, S.IP. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641117 198702 1 001	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
22.	TOTO JAYA, S.Pi Pembina (IV/a) NIP. 19720229 200604 1 008	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
23.	GEORGE HEPLIN EDWAR DODDY, S.Sos. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670220 198911 1 001	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
24.	Drs. ROBY, M.A.P. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670308 199203 1 000	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
25.	Drs. ANDREI NATANAEL, MAP. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19661227 198608 1 001	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
26.	MOZARD D. STAING, S.Pi Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19741004 200003 1 003	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
27.	GLORIKUS G., SKM, M.Kes. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19710629 200003 1 001	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA

flw

28.	MARKUS, S.Pd, MPH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19760217 199603 1 002	KEPALA BADAN PENDANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
29.	RAHIMANSYAH, S.T. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19770609 201101 1 002	KEPALA BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
30.	EDDY PETRUSWANDIE, ST, M.T Penata (III/d) NIP.19830912 201101 1 001	KEPALA BIDANG PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
31.	ROMULUS, SH. M.H Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19760721 200112 1 001	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
32.	BUDI PRABOWO, S.Pt, M, Si Pembina (IV/a) NIP. 19740527 199903 1 006	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN HOLTIKOLTORA DAN PENYULUH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
33.	MARKANO, S.P Penata Tk. I (III/d) NIP. 19790329 200604 1 008	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
34.	MARTINA HERMIN, SE Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19830325 200804 2001	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
35.	ROSINDAH, S.T Pembina (IV/a) NIP. 19670827 199303 2 008	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
36.	DIDIT WAHYUDI, M.Si Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19761007 199903 1 005	ANALIS KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
37.	BENONG SUPRIADI, ST Penata (III/c) NIP. 19780829 201001 1 007	ANALIS KEBIJAKAN PENGATURAN PEMBINAAN TATA RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA

fw

38.	YUSEPTO NOVALINO, ST Penata Tingkat I (III/d) NIP. 197409182005011007	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
39.	DEWI SARTIKA, ST Penata (III/d) NIP.19810826 201001 1 004	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
40.	ADITAMA NIP.19711102 200701 1 016	PELAKSANA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
41.	DIDI DARMADIE NIP.19770616 200701 1 015	PELAKSANA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
42.	DODO NIP.19660215 200701 1 020	PELAKSANA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN	ANGGOTA
43.	NULIE, A. Ma	TENAGA HARIAN LEPAS	ANGGOTA
44.	SUSANTIE, Amd	TENAGA HARIAN LEPAS	ANGGOTA
45.	JHENNI LOUSIYA	TENAGA HARIAN LEPAS	ANGGOTA
46.	MITRAN TONI SURYA	TENAGA HARIAN LEPAS	ANGGOTA
47.	IKA YULIA SISKI, S.Pd	TENAGA HARIAN LEPAS	ANGGOTA
48.	AXEL FARELLIO PUTRA	TENAGA HARIAN LEPAS	ANGGOTA
49.	Camat Setempat		ANGGOTA
50.	Lurah/Kades Setempat		ANGGOTA

f w

TENAGA AHLI PENDAMPING

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	YULIAND SETIAWAN, S.Si, M.Sc	KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH KANTOR PERTANAHAN/BPN KABUPATEN KATINGAN	TENAGA AHLI PENGADAAN TANAH
2.	FERRY SUKMANA, S.ST	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN/BPN KABUPATEN KATINGAN.	TENAGA AHLI INSFRASTRUKTUR PERTANAHAN

Pj. BUPATI KATINGAN,

SAIFUL